



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI ZURAIDAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 413054

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/86 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 316.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 468.000.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.015.777.611

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.650.277.611



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.650.277.611

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.